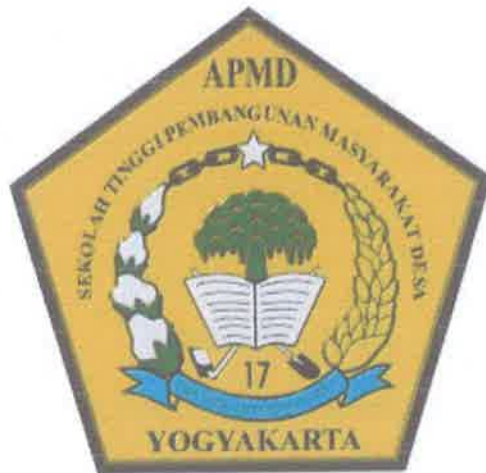


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DI PERKOTAAN
(Studi Di Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Disusun Oleh:

**VALENTINA FEBBYOLA WAHYUNIPAN
18520023**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025



HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DI PERKOTAAN**

(Studi Di Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta)

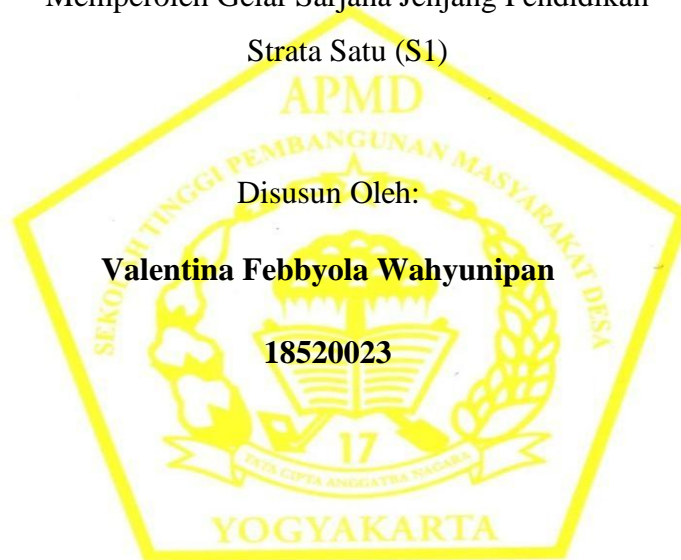
SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan
Strata Satu (S1)

Disusun Oleh:

Valentina Febbyola Wahyuniphan

18520023



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 April 2025

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si.

Ketua Penguji/Pembimbing

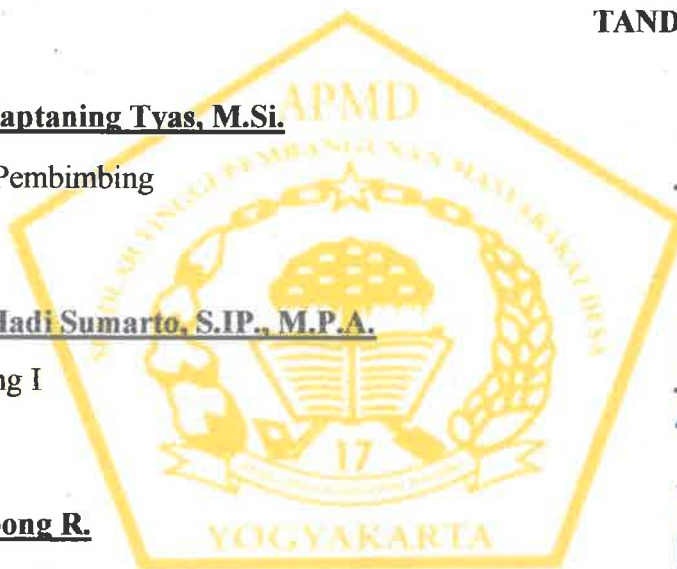
Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., M.P.A.

Penguji Samping I

Dr. RY. Gembong R.

Penguji Samping II

TANDA TANGAN



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Valentina Febbyola Wahyunipan

Nim : 18520023

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Perkotaan (Studi Di Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta)” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 April 2025



Valentina Febbyola Wahyunipan

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Valentina Febbyola Wahyunipan
NIM : 18520023
Telp : 089519404735
Email : febbyollavallent@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Perkotaan (Studi Di Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 16 April 2025

Yang membuat pernyataan



Valentina Febbyola Wahyunipan

18520023

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Karena atas berkat dan Rahmat-nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semoga bermanfaat bagi banyak orang. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasi penulis karean berkat doa dan dukungan mereka penulus dapat menyelesaikan skripsi ini:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melindungi, menyertai dan memberikan nafas kehidupan sampai dengan saat ini.
2. Teristimewa Kepada pahlawan, cinta pertama penulis, referensi hidup terbaik selama penulis hidup hingga saat ini yakni, Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan semangat, pelukan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Keduanya merupakan merupakan sosok orang tua yang berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah. Penulis sadar, bahwa setiap kata dalam Skripsi ini adalah buah dari kerja keras yang disertai doa dari kedua orang tuaku. Skripsi ini adalah persembahan dari anak kalian yang saat ini sudah mulai tumbuh dewasa. Terimakasih atas nasehat dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah kaki penulis. Skripsi ini mungkin belum sebanding dengan apa yang sudah bapak ibu berikan buat penulis.

MOTTO

“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang”

(Soekarno)

“pengharapan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu”

(John Ruskin)

"Tetaplah berusaha, karena setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada tujuan besar"

(Sultan Alor)

“Kerjakan Bagian Kita Selebihnya Serahkan Kepada TUHAN AMIN”

(Valentina Febbyola Wahyunipan)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunianya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Perkotaan (Studi Di Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, di kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
4. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si. selaku dosen pembimbing yang sudah berbesar hati menerima saya sebagai anak bimbingan, serta senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir.
5. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., M.P.A. selaku Dosen penguji satu saya, yang sudah membantu dan membimbing penulis serta sumbangan pemikiran, pengetahuan dan gagasannya.

6. Bapak Dr. RY. Gembong R. selaku Dosen penguji Dua saya, yang sudah meluangkan waktunya membantu dan membimbing penulis serta menyumbangkan pemikiran, pengetahuan dan gagasan-gagasannya.
7. Bapak/Ibu Dosen, yang sudah bersedia meluangkan waktu melayani, memberikan ilmunya dan mendidik selama penulis menimba ilmu di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
8. Pemerintah Kelurahan Muja Muju yang telah bersedia dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini. Dan kepada para masyarakat Kelurahan Muja Muju yang telah bersedia untuk menjadi narasumber penulis ucapkan limpah terima kasih.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Fokus Penelitian.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Akademik.....	14
2. Manfaat praktis	14
F. Literatur Review	14
G. Kerangka Konseptual.....	25
1. Implementasi Kebijakan Pemerintah	25
2. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).....	28
H. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Unit Analisis	40
3. Teknik Pengumpulan Data.....	42
4. Teknik Analisis Data.....	46

BAB II PROFIL KELURAHAN MUJA MUJU	50
A. Sejarah Kelurahan.....	50
B. Visi Misi Kelurahan Muja Muju	51
1. Visi.....	52
2. Misi.....	52
C. Kondisi Geografi Kelurahan Muja Muju.....	52
D. Kondisi Demografi Kelurahan Muja Muju.....	53
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	53
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	54
5. Sarana dan Prasarana Kelurahan Muja Muju	54
6. Institusi/Kelembagaan Kelurahan	56
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI	
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM	
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI PERKOTAAN	62
A. Analisis Data.....	62
1. Komunikasi dalam pelaksanaan PKK.....	62
2. Sumberdaya Pelaksanaan PKK.....	65
3. Disposisi pelaksanaan PKK	70
4. Struktur organisasi pelaksanaan PKK.....	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
PEDOMAN WAWANCARA	79
DOKUMENTASI WAWANCARA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan	42
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian	53
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat pendidikan	54
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	54
Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana	55
Tabel 2. 6 Prasarana Pendidikan	55
Tabel 2. 7 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).....	58
Tabel 2. 8 Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Pemerintah Kelurahan Muja Muju	57
---	----

INTISARI

Salah satu organisasi yang berikhtiar untuk memberdayakan kaum perempuan di desa adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Organisasi PKK bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan dapat membina keluarganya. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memang memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Berdasarkan data dari Profil Kelurahan, jumlah penduduk Kelurahan Muja Muju pada tahun 2024 adalah 10.956 jiwa dengan 3.670 Kepala Keluarga (KK), di mana jumlah penduduk perempuan mencapai 5.562 jiwa, sedangkan laki-laki berjumlah 5.387 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Muja Muju, perempuan mendominasi jumlah penduduk. Di Kelurahan Muja Muju, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan sebagai wadah penting dalam menampung dan menyuarakan aspirasi perempuan terkait pembangunan kelurahan. Melalui PKK, aspirasi perempuan dapat dikumpulkan dan disalurkan melalui musyawarah kelurahan, yang merupakan forum untuk diskusi dan pengambilan keputusan terkait pembangunan di tingkat kelurahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. subjek dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kelurahan Muja Muju dan Masyarakat Kelurahan Muja Muju. Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keberhasilan program PKK di Kelurahan Muja Muju ditentukan oleh komunikasi yang efektif, dukungan pemerintah, struktur organisasi yang baik, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berperan penting melalui penyediaan fasilitas, anggaran, serta pelatihan bagi masyarakat, khususnya perempuan. Identifikasi potensi, alokasi anggaran yang tepat, dan evaluasi berkala mendukung efisiensi program. Struktur organisasi yang jelas juga memperkuat koordinasi dan akuntabilitas. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mendukung keberhasilan program PKK di Kelurahan Muja Muju, disarankan agar pemerintah dan pengurus PKK meningkatkan efektivitas komunikasi melalui berbagai media dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Selain itu, perluasan akses dan partisipasi warga, khususnya perempuan, harus terus diupayakan dengan menyediakan fasilitas yang mudah dijangkau dan wadah keterlibatan yang inklusif. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan juga penting untuk meningkatkan kualitas kader dan anggota masyarakat. Tak kalah penting, struktur organisasi PKK perlu diperkuat agar lebih adaptif, dengan evaluasi rutin guna memastikan program berjalan efektif, transparan, dan sesuai tujuan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, PKK

ABSTRACT

One of the organizations striving to empower women in rural areas is the Family Welfare Empowerment (PKK) organization. PKK aims to empower women to become independent individuals capable of nurturing their families. The PKK is supported by a strong legal foundation through the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 36 of 2020, which implements Presidential Regulation No. 99 of 2017 concerning the Movement for Family Empowerment and Welfare. According to the Kelurahan Profile data, the population of Muja Muju Urban Village in 2024 is 10,956 people with 3,670 households, where the female population reaches 5,562, while the male population is 5,387. This indicates that in Muja Muju, women make up the majority of the population. In this area, the PKK serves as an important platform for gathering and voicing women's aspirations related to local development. Through the PKK, these aspirations are collected and conveyed through village deliberation forums, which function as platforms for discussion and decision-making on development issues at the village level.

This research uses a qualitative, descriptive method. The subjects of this study consist of the Muja Muju Village Government and the local community, selected using purposive sampling techniques.

The findings of this research indicate that the success of the PKK program in Muja Muju is determined by effective communication, government support, a solid organizational structure, and strengthened human resource capacity. The government plays a crucial role by providing facilities, funding, and training for the community, particularly women. Identifying potential, allocating appropriate budgets, and conducting regular evaluations support the program's efficiency. A clear organizational structure also enhances coordination and accountability. Collaboration between the government and the community is key to sustainably improving family and community welfare.

To support the success of the PKK program in Muja Muju, it is recommended that the government and PKK administrators enhance communication effectiveness through various media and direct engagement with the community. Moreover, efforts to expand access and participation, especially for women, must continue by providing accessible facilities and inclusive platforms for involvement. Strengthening human resource capacity through ongoing training and mentoring is also essential to improve the quality of cadres and community members. Equally important, the PKK's organizational structure must be reinforced to be more adaptive, with regular evaluations to ensure the program runs effectively, transparently, and according to its objectives.

Keywords: Implementation, Policy, PKK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan merupakan tugas yang diemban oleh aparatur sipil negara, tidak terkecuali pemerintah kelurahan yang merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Akh Muwafik Saleh, 2010:64). Pembangunan sosial dianggap sebagai sesuatu yang bersifat residual (sisa-sisa dari pertumbuhan ekonomi). Padahal, pembangunan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi dan kedua elemen ini berjaln keindahan satu sama lain. Absennya perhatian pada pembangunan sosial diakibatkan terjadinya eksklusi pembangunan pada masyarakat bawah, rakyat miskin, kaum rentan. Mereka mengalami ketertutupan akses serta tertinggal dalam proses setiap proses pembangunan (Haryono, 2020:282).

Kaum perempuan merupakan salah satu bagian dari kelompok yang rentan dalam masyarakat. Di tingkat kelurahan, perempuan termasuk dalam komponen warga yang sering kali terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik, serta hidup dalam kondisi kemiskinan. Hal ini dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat, yang secara tidak langsung membentuk posisi perempuan sebagai masyarakat nomor dua. Eksistensi perempuan dalam masyarakat berusaha untuk menjalankan peranan publik, salah satunya melalui partisipasi aktif dalam berbagai sektor. Namun, meskipun demikian, sering kali partisipasi

tersebut hanya dianggap sebagai formalitas belaka tanpa memberikan pengaruh yang signifikan. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan sering kali dikategorikan sebagai "pekerja gratis", yaitu pekerjaan yang tidak dianggap bernilai atau kurang dihargai secara finansial. Pekerjaan ini umumnya lebih bersifat mengasuh, melayani masyarakat, dan membantu pekerjaan rumah tangga, yang meskipun esensial, sering kali tidak mendapatkan pengakuan atau penghargaan yang layak.

Dengan kenyataan seperti ini, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan yaitu melalui pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan diasumsikan bahwa jika ingin meningkatkan kapasitas perempuan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya untuk memperoleh akses pada pelayanan publik dan untuk merubah nasibnya sendiri (Pratama, 2013:12).

Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan posisi tawar perempuan adalah melalui pengorganisasian. Hal ini sejalan dengan ajaran yang disampaikan oleh penganut paham struktural-radikalis. Penganut paham struktural-radikalis memandang bahwa desa adalah situs ketimpangan, penindasan, penghisapan elit terhadap kaum proletar (Sutoro Eko, 2017:9). Pengorganisasian merupakan langkah yang sangat penting dan konkret untuk memberdayakan masyarakat, terutama perempuan, agar dapat lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Pengorganisasian ini juga membuka kesempatan bagi perempuan untuk saling

mendukung dan membangun solidaritas, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi mereka di dalam keluarga dan masyarakat.

Salah satu organisasi yang berikhtiar untuk memberdayakan kaum perempuan di desa adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Organisasi PKK bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan dapat membina keluarganya. Singkatnya, PKK adalah sebuah organisasi yang berbasis pada keluarga yang dapat digunakan ujung tombak pembangunan (Nurdewantoro, 2015:100).

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan organisasi masyarakat yang diperuntukkan bagi para wanita agar dapat mengembangkan dirinya di dalam masyarakat (Arisandi, 2015:1887). Melalui pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan utama untuk memberdayakan perempuan agar dapat mengembangkan potensi diri mereka dalam konteks masyarakat. PKK merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memang memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi yang mewadahi perempuan yang tidak berada di bawah departemen. Melalui PKK diharapkan harkat dan martabat perempuan sebagai bagian dari keluarga dapat ditingkatkan (Hanis dan Marzaman, 2019:124).

Organisasi PKK memang memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam berbagai bidang, terutama dalam pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan gender. Keberadaan PKK dapat mendukung kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Dengan fokus pada pemberdayaan perempuan, PKK membantu mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, yang merupakan bagian penting dari pembangunan sosial yang inklusif.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pengarusutamaan gender telah dijalankan dengan baik melalui berbagai inisiatif, seperti sosialisasi, koordinasi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan pelaksanaan PPRG (Pengarusutamaan Perempuan dalam Pembangunan). Komitmen untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan di Yogyakarta juga telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2009-2013 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2009 yang menunjukkan pentingnya peran perempuan dalam setiap aspek pembangunan daerah. Untuk mewujudkan pengarusutamaan gender tersebut, pemerintah DIY menggandeng berbagai organisasi dan lembaga masyarakat, salah satunya adalah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

(PKK).

Di tingkat kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan. PKK di kelurahan dapat menjadi salah satu organisasi yang terlibat langsung dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan kaum perempuan untuk terlibat dalam pembangunan di kelurahan. Salah satu kelurahan yang masih mengandalkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam pembangunan adalah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Muja Muju selain merupakan salah satu struktur organisasi kelurahan, juga merupakan gerakan yang ikut serta dalam pembangunan kelurahan.

Berdasarkan data dari Profil Kelurahan, jumlah penduduk Kelurahan Muja Muju pada tahun 2024 adalah 10.956 jiwa dengan 3.670 Kepala Keluarga (KK), di mana jumlah penduduk perempuan mencapai 5.562 jiwa, sedangkan laki-laki berjumlah 5.387 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Muja Muju, perempuan mendominasi jumlah penduduk. Keberadaan jumlah penduduk perempuan yang cukup signifikan ini menjadikan perempuan sebagai sumber daya manusia yang potensial untuk mendukung pembangunan kelurahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan kaum perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik

dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Muja Muju, berperan sebagai wadah penting dalam menampung dan menyuarakan aspirasi perempuan terkait pembangunan kelurahan. Melalui PKK, aspirasi perempuan dapat dikumpulkan dan disalurkan melalui musyawarah kelurahan, yang merupakan forum untuk diskusi dan pengambilan keputusan terkait pembangunan di tingkat kelurahan.

Ada banyak hal yang telah dikerjakan oleh PKK di Kelurahan Muja Muju, salah satunya adalah pengembangan olahan makanan. Sebagaimana yang dikutip, keterlibatan PKK dalam pembangunan menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Muja Muju telah berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini didukung oleh Lurah Muja Muju. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Lurah Muja Muju memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan akses, suara, dan kontrol dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan Muja Muju.

Meskipun demikian, ada dua faktor yang menghambat keterlibatan PKK dalam pembangunan di Kelurahan Muja Muju yaitu struktur budaya dan pandangan stereotip. Terkait dengan faktor struktur budaya, salah satu hambatan utama adalah pandangan tradisional masyarakat seperti ungkapan *kanca wingking* (teman dapur). Ungkapan ini mengartikan bahwa segala nasib dari perempuan tergantung oleh suami. Pepatah Jawa lain yang sering muncul yaitu *“swarga nunut neraka katut”*. Pepatah ini mengandung arti bahwa

kebahagiaan maupun penderitaan istri tergantung pada suami. Kebudayaan tersebut sangat mencerminkan minimnya kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam pembangunan di desa. Berkaitan dengan pandangan stereotip, Secara umum, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga. Stereotip ini berakar dalam budaya yang sudah berlangsung lama dan membentuk kebiasaan serta norma sosial yang menomorduakan peran perempuan dalam berbagai bidang.

Dalam ketentuan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyebutkan bahwa: 1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan berfungsi sebagai wadah yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lain dengan mengkoordinasi kegiatan dasawisma; 2) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK; 3) Kecamatan atau disebut dengan nama lain bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat; 4) Kelurahan adalah bagian wilayah administratif dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan; 5) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri,

suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya; 6) Sistem Informasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (SIM PKK) adalah aplikasi yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data program dan kelembagaan Gerakan PKK; 7) Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin Kementerian, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri. Pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pembangunan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas. Pendekatan ini harus bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. untuk mendukung gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan kemampuan dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berguna dan berhasil guna.

PKK merupakan pedoman penataan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 adalah lembaga kemasyarakatan yang juga dikenal dengan berbagai nama lain sesuai kebutuhan di masing-masing daerah, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. Lembaga ini berperan sebagai mitra pemerintah desa dan lurah dalam upaya

pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk mengorganisasi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan meliputi beberapa organisasi di tingkat komunitas, seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

PKK memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah desa dan kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, mandiri, dan harmonis. Selain itu, PKK juga berperan dalam mengembangkan potensi perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga (Dzikrillah & Ansori, 2018). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, PKK menerapkan 10 Program Pokok PKK yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga, dengan fokus pada pengembangan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Namun, meskipun 10 Program Pokok PKK dirancang untuk dilaksanakan secara konseptual dan efektif, dalam praktiknya, banyak program tersebut yang belum berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam dan profesional mengenai tujuan serta pelaksanaan program-program tersebut. Sebagian besar anggota PKK dan masyarakat belum memahami dengan baik prinsip dan pelaksanaan dari program-program dasar PKK ini (Sunaryo, 2020).

Pelibatan masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdayaan yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap aspek pembangunan, dengan tujuan agar pembangunan tersebut dapat dipimpin dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri (Nastia et al., 2022). Dalam konteks ini, peran PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan telah cukup berhasil dilaksanakan. Hal ini terlihat dari berbagai program pemberdayaan yang dijalankan oleh PKK, seperti penyuluhan, pelatihan keterampilan, serta pemasaran produk hasil pemberdayaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama perempuan, dalam mengembangkan life skills dan meningkatkan pendapatan keluarga (Mulyati & Suhaety, 2021).

Menurut Soetomo, "*community engagement*" atau keterlibatan masyarakat mencakup seluruh proses pembangunan, yang dimulai dengan "pengambilan keputusan, identifikasi masalah berdasarkan kebutuhan masyarakat, perancangan program, pelaksanaan program, hingga penilaian dan pemanfaatan hasil pembangunan tersebut oleh masyarakat" (Masyarakat, 2021). Dengan melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam proses ini, pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif, karena masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan program yang dilaksanakan. Peran PKK dalam konteks ini sangat strategis, karena PKK tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, dari perencanaan hingga evaluasi, yang pada akhirnya memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Masalah lain yang

muncul adalah banyak anggota yang tidak mau terlibat atau terlibat dalam Program ini. Masalah lain yang muncul dalam implementasi program pemberdayaan PKK adalah kurangnya partisipasi dari sebagian anggota, yang lebih memilih untuk tinggal di rumah daripada berpartisipasi dalam kegiatan yang telah direncanakan oleh tim PKK. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya motivasi atau ketertarikan dari anggota masyarakat untuk terlibat aktif dalam program-program pemberdayaan yang diselenggarakan. Kurangnya antusiasme dari pemerintah dan kurangnya tim PKK menyebabkan masyarakat lamban dan ragu untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKK. Selain itu, terdapat persoalan lain seperti tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Muja Muju yang masih rendah. Dalam penelitian ini konsep 5G yang diambil adalah konsep *Governing*. Dalam konsep *Governing* dijelaskan terkait perbuatan pemerintah yang mencakup fungsi, cara, dan tindakan. *Governing* sendiri jika diterjemahkan secara harfiah, dapat diartikan sebagai kata kerja yang bermakna "memerintah". Namun, dalam konteks pemerintahan, kata memerintah tidak lazim digunakan karena lebih tepat jika menggantinya dengan frasa menyelenggarakan pemerintahan. Menyelenggarakan pemerintahan mengandung makna bahwa terdapat suatu otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan negara atau masyarakat. Konsep *Governing* yang lebih tepat dipahami sebagai upaya mengatur dan mengurus mencakup serangkaian proses, fungsi, dan hasil.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kelurahan Muja Muju, ditemukan beberapa permasalahan terkait pemberdayaan perempuan melalui program PKK. Meskipun banyak perempuan di kelurahan ini, mereka belum diberdayakan dengan optimal dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh PKK. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif antar anggota PKK, sehingga informasi terkait program-program pemberdayaan perempuan tidak tersebar dengan baik. Padahal, sumber daya manusia dalam organisasi PKK sudah memadai, dengan sejumlah anggota yang memiliki keterampilan dan potensi untuk menjalankan program-program tersebut.

Selain itu, partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam kegiatan PKK juga masih rendah. Banyak perempuan yang belum merasa terlibat atau terdorong untuk aktif dalam kegiatan PKK, meskipun manfaat yang ditawarkan cukup besar bagi pemberdayaan mereka. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat sarana dan prasarana yang ada sudah memadai dan siap untuk mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan. Dengan adanya fasilitas yang memadai, seharusnya kegiatan PKK bisa dilaksanakan lebih optimal dan mampu menarik lebih banyak partisipasi dari masyarakat.

Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam meningkatkan komunikasi internal PKK, serta menciptakan strategi yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, yang dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Perkotaan?

C. Fokus Penelitian

1. Komunikasi dalam pelaksanaan PKK
2. Sumberdaya pelaksanaan PKK
3. Disposisi pelaksanaan PKK
4. Struktur organisasi pelaksanaan PKK

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui tentang dampak kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah menggambarkan terkait implementasi kebijakan program PKK perkotaan yakni di Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

1. Menggambarkan kebijakan pemerintah Kelurahan Muja Muju memberikan fasilitas pembinaan dan pengembangan PKK;
2. Memberi penjelasan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program PKK Kelurahan Muja Muju.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dengan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pengembangan bidang ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian teori Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kelurahan Muja Muju dalam dalam mengoptimalkan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

F. Literatur Review

Penelitian ini tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di perkotaan. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) memang sejak awal dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat, terutama kaum perempuan. Dalam konteks ini, PKK berperan sebagai fasilitator yang mendorong perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Program-program yang diusung oleh PKK sering kali difokuskan pada pengembangan keterampilan, pendidikan, dan kesehatan yang memungkinkan perempuan

untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya. Selain itu, dengan melibatkan perempuan di tingkat kelurahan, PKK berperan penting dalam meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender. Khususnya di kelurahan. Namun walaupun keterlibatan PKK dalam pembangunan menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Muja Muju telah berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan kesetaraan gender akan tetapi masih terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan penyelenggara PKK seperti struktur budaya dalam pandangan stereotip yang masih menganggap rendah terhadap kaum perempuan dalam suatu pembangunan. Di sisi lain, kurangnya antusiasme dari pemerintah menyebabkan masyarakat lamban dan ragu untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKK. Adapun terdapat persoalan lain seperti tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Muja Muju yang masih rendah.

Penelitian-penelitian tentang pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh PKK telah banyak dilakukan untuk memahami sejauh mana peran dan dampaknya terhadap kehidupan perempuan di berbagai tingkat masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu yang mencoba mengungkap cara kerja PKK dalam pemberdayaan perempuan, diantaranya:

Pertama, jurnal penelitian yang berjudul “*Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Dasa Wisma PKK*”, Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis 2 (1), 99-102, 2015 vol 2, Tahun 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Nurdewanto, Eny Yuniriyanti, dan Ririn Sudarwati ini memang menunjukkan pentingnya pendekatan strategis dalam pemberdayaan perempuan melalui program-program yang diadakan oleh PKK. Dalam penelitian ini, mereka

mengidentifikasi beberapa strategi pemberdayaan yang efektif untuk membantu perempuan dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi. Adapun beberapa materi yang diajarkan dalam pelatihan tersebut mencakup; keterampilan tentang konsep dasar kewirausahaan, pelatihan manajemen usaha, dan pembukuan sederhana serta materi praktik yang meliputi pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan penanaman sayuran organik polybag, pelatihan produksi makanan olahan berbasis sayuran organik, dan pelatihan pembuatan kue.

Kedua, penelitian yang berjudul “*Pemberdayaan Perempuan Melalui Organisasi PKK di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon*”, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021 vol 2, Tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Halimatu Sa’diah menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK di Kelurahan Sunyaragi memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarga. Pemberdayaan ini mencakup berbagai bidang, yang masing-masing dikelola oleh kelompok kerja (POKJA) yang berbeda, yaitu: POKJA I (Bidang Keagamaan): Fokus pada pemberdayaan perempuan melalui penguatan nilai-nilai agama, yang dapat membentuk karakter dan moralitas dalam masyarakat. POKJA II (Bidang Peningkatan Ekonomi): Mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan dan usaha mikro, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. POKJA III (Bidang Tata Laksana Rumah Tangga): Berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga, seperti pengelolaan rumah tangga yang lebih efisien dan

berbasis pada kesejahteraan keluarga. POKJA IV (Bidang Kesehatan): Mengedukasi perempuan tentang pentingnya kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, gizi keluarga, serta sanitasi yang baik. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pemberdayaan perempuan melalui PKK di Kelurahan Sunyaragi meliputi: Partisipasi Warga Masyarakat: Banyak warga yang aktif berpartisipasi dalam mendukung kegiatan PKK, yang menunjukkan adanya kesadaran kolektif dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan kualitas hidup. Motivasi Tim Penggerak PKK: Tim penggerak PKK memiliki semangat dan komitmen yang tinggi untuk terus mengembangkan program-program pemberdayaan dan menciptakan perubahan positif di masyarakat. Tersedianya Fasilitas: Fasilitas yang ada di kelurahan, seperti tempat pelatihan dan sarana pendukung lainnya, mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKK yang dimiliki oleh Tim Penggerak PKK. Meskipun demikian, terdapat juga faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK, yaitu: terbatasnya Tim Penggerak PKK yang aktif, kaderisasi kepengurusan yang kurang optimal, dan terbatasnya dana penunjang operasional kegiatan PKK untuk melaksanakan program kegiatan.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan PKK Dalam Menangani Kesehatan Anak, Ibu Hamil, dan Lansia Sesuai Isi 10 Program Pokok PKK Di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang”. Respon Publik 13 (2), 33-37, 2019 Vol 1, Tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Laily Agustin, Slamet Muchsin, dan

Roni Pindahanto Widodo menunjukkan bahwa PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan posyandu (pos pelayanan terpadu). Keberadaan kader posyandu memberikan dampak positif terhadap penanganan masalah kesehatan di masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan posyandu menghadapi berbagai hambatan. Faktor-faktor yang menghambat tersebut antara lain adalah kondisi fisik lansia yang terkadang sudah lemah dan tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan posyandu, perubahan cuaca yang tidak menentu, serta keterbatasan dalam hal peralatan yang digunakan dalam posyandu. Hambatan-hambatan ini memerlukan perhatian agar penyelenggaraan posyandu dapat lebih efektif dan optimal.

Keempat, penelitian yang berjudul “*Strategi Pelaksanaan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Samarinda Utara*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan 5 (2), 861-872, 2017 Vol 5, Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan oleh Rizky Indrawati. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan cukup baik dan memberikan dampak yang positif dalam hal melaksanakan kegiatan dalam 10 program kerja PKK.

Kelima, jurnal penelitian yang berjudul “*Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga*”, Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) 8 (2), 123-135, 2020 Vol 8, Tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Nikma Wahyuni Hanis dan

Atika Marzaman. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PKK telah memberikan manfaat dalam pemberdayaan perempuan khususnya di Desa. Keberhasilan diperoleh berkat adanya dukungan pemerintah di tingkat kecamatan dan juga atas pembinaan langsung oleh pengurus PKK Kabupaten Gorontalo kepada PKK Kecamatan hingga desa.

Keenam, jurnal penelitian yang berjudul “*Strategi Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di RT 23 RW 9 Puri Panjalu-Betet Indah Kelurahan Betet Kediri*”, Vol 5, Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan oleh Nunuk Helilusiatiningsih, Nastiti Winahyu dan Ribut Santosa. Penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemberdayaan ini bertujuan membina dan meningkatkan kinerja program PKK yang berlangsung secara berkesinambungan di perumahan ini. Metode pemberdayaan perempuan menggunakan penyuluhan, diskusi tanya jawab, pelatihan ketrampilan, pertemuan rutin semua anggota dan ketua RT serta pengurus dalam membahas kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini didukung oleh Bapak Ketua RW 9 serta Ibu Ruli selaku Ketua RT 23 serta semua warga giat dalam rembug warga untuk mencapai musyawarah mufakat dalam segala kegiatan yang bermanfaat.

Ketujuh, jurnal penelitian yang berjudul “*Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Retok Kecamatan Retok B*”, PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) 6 (1), 2017 Vol 6, Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan oleh Abigail Rotua Meiroda Sibarani. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan

kesejahteraan keluarga bertujuan memberikan pemahaman terkait implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Kedelapan, jurnal penelitian yang berjudul “*Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Melalui Gerakan PKK di Desa Cihanjuang*”, Comm-Edu (Community Education Journal) 1 (3), 7-13, 2018 Vol 1, Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan oleh Ashri Bunga Dzikrillah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kemajuan sebuah desa tidak akan terlepas dari keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin daerahnya. Dengan adanya undang-undang tentang desa yang memberikan wewenang kepada kepala desa untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat. Salah satu cara yang dilakukan untuk mensejahterakan rakyatnya adalah dengan memanfaatkan organisasi kemasyarakatan salah satunya adalah PKK. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang: Bagaimana peran kepala desa dalam pemberdayaan perempuan melalui gerakan PKK? Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana peran kepala desa dalam pemberdayaan perempuan melalui gerakan PKK. (2) Bagaimana strategi kepala desa dalam pemberdayaan perempuan melalui gerakan PKK.

Kesembilan, jurnal penelitian yang berjudul “*Peran Ketua PKK dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*”, Universitas Mulawarman, 2016 Vol 4, Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan oleh Ripca Dwi Hadi Agustin. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran ketua PKK dalam pelaksanaan program pendidikan dan keterampilan, program kesehatan, dan program ekonomi,

peran ketua PKK berperan sebagai pemimpin, Pembina, mengkoordinator, dan mengarahkan anggotanya serta mengawasi secara langsung, pelaksanaan kegiatan PKK, dan menjadi fasilitator yaitu memfasilitasi tempat dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKK. Ada dua faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat peran ketua PKK dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan yaitu susahny mengarahkan TP PKK karena kurangnya tingkat pengetahuan dan keterampilan anggota PKK, anggota PKK yang susah dikumpulkan karena memiliki kesibukan masing-masing, dan minimnya anggaran dana yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan PKK. Sedangkan faktor pendukungnya berupa dukungan semangat dari camat, keluarga, dan TP PKK, serta pengalaman pernah menjadi anggota PKK, sebelum menjabat sebagai ketua PKK.

Kesepuluh, jurnal penelitian yang berjudul “*Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kabupaten Subang*”, International Journal of Demos 1 (2), 262-289, 2019 Vol 1, Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan oleh Tony Pathony Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan dan Gerakan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Subang sesuai dengan teori-teori yang diungkapkan oleh Edi Suharto yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan.

Secara umum, kesepuluh penelitian di atas mengarahkan perhatian

pada program PKK bagi kaum perempuan. Pada umumnya, penelitian terdahulu tentang PKK yang sangat menonjol adalah program yang berhubungan dengan urusan domestik dan ekonomi (terutama pendapatan rumah tangga). Namun, penelitian tentang program-program yang berkaitan dengan pangan, pakaian, dan tata kelola rumah tangga ini hanya semakin memberi penekanan bahwa istri adalah pendamping suami. Konsentrasi penelitian pada program-program tersebut semakin memperkuat anggapan bahwa urusan rumah tangga sebagai tanggung jawab perempuan.

Berangkat dari uraian di atas, maka penelitian ini berusaha untuk menggambarkan implementasi kebijakan PKK dalam memberdayakan perempuan dengan lebih memfokuskan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program PKK melalui organisasi PKK dan berupaya untuk menjelaskan pandangan masyarakat kelurahan Muja-Muju yang selalu beranggapan bahwa kaum perempuan tidak memiliki pengaruh secara signifikan dalam proses pembangunan. Faktor-faktor budaya tersebut yang menjadi tolak ukur masyarakat sehingga selalu beranggapan bahwa kaum perempuan tidak memiliki legalitas atau kemampuan intelektual dalam suatu pembangunan sehingga minimnya kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam pembangunan di desa. Berikut perbedaan dari 10 literatur review tentang pemberdayaan perempuan melalui PKK:

Perbedaan Umum

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) umumnya berfokus pada ruang lingkup desa, dengan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat secara mikro. Dalam studi-studi tersebut, PKK diposisikan sebagai instrumen sosial yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok masyarakat dalam skala terbatas, khususnya pada penguatan peran perempuan di tingkat desa. Aktivitas PKK dalam konteks tersebut dipahami lebih sebagai bentuk partisipasi sukarela yang bersifat lokal, tanpa banyak menyinggung dinamika kebijakan yang mengatur atau mendukung peran serta mereka dalam pembangunan.

Namun demikian, pendekatan semacam ini belum sepenuhnya mampu menggambarkan bagaimana PKK beroperasi dalam konteks sosial yang lebih kompleks seperti di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan perspektif baru. Studi ini memilih lokasi di kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik berbeda dari pedesaan, baik dari segi kepadatan penduduk, keberagaman sosial, maupun struktur birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, tantangan pemberdayaan menjadi lebih beragam dan membutuhkan strategi serta pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan terkoordinasi.

Kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya melihat peran PKK dari aspek pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menelusuri secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan pemerintah mempengaruhi dan membentuk dinamika pemberdayaan tersebut di tingkat perkotaan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah mendukung, mengarahkan, atau bahkan membatasi ruang gerak PKK dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran praktis mengenai aktivitas PKK di kota, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dalam memahami hubungan antara kebijakan publik dan pemberdayaan komunitas dalam konteks urban.

Dengan pendekatan ini, studi ini memperluas horizon analisis terhadap peran PKK sebagai aktor penting dalam pembangunan berbasis komunitas. PKK tidak lagi hanya dilihat sebagai pelengkap kegiatan kemasyarakatan di tingkat lokal, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah yang perannya sangat dipengaruhi oleh desain dan implementasi kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan pemberdayaan yang lebih inklusif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan.

G. Kerangka Konseptual

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Pernyataan kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah yang memberikan pengertian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan pemerintah.

Menurut Philipus M. Hadjon “Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.(H.S, Sunardi & Tri Purwanto, 2016). Dalam pandangan George C. Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi; keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
- b. Sumber Daya; walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi; merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
- d. Struktur organisasi; merupakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengetahuan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Perlu dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chif J.O, dengan mengatakan bahwa, hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau *output* yang

biasanya terwujud dalam bentuk konkret, keluaran atau *outcome* yang biasanya terwujud rumusan target.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat vital dalam proses kebijakan publik, karena implementasi menjadi faktor determinan dalam menentukan keberhasilan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi persoalan publik. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan yang sudah direkomendasikan oleh *policy makers* tidak menjamin kebijakan tersebut pasti berhasil, karena kompleksitas implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel baik variabel individual maupun organisasional (Tachjan, 2016:13).

Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian kebagian lain secara berkesinambungan, saling menguatkan dan saling membentuk. Sebelum diimplementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami kemunduran karena gagal mencapai maksud dan tujuan (Agustino, 2006:8). Kebijakan pemberdayaan PKK Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

2. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

a. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada upaya penghapusan subordinasi perempuan. Hal ini berarti bahwa terdapat tuntutan untuk kesamaan hak ekonomi, hak-hak resmi yang tidak diskriminatif, dan hak-hak reproduksi untuk dimasukkan di dalam setiap agenda pembicaraan publik. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan praktis, yaitu dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi baik perempuan maupun laki-laki dan melalui pemenuhan kebutuhan strategi, yaitu dengan melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari posisi dimana perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2016).

Program pemberdayaan PKK di Kota Yogyakarta dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan

sosial. Berbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu fokus utama adalah penurunan stunting dan peningkatan kesehatan, di mana TP PKK Kota Yogyakarta berkomitmen untuk mengatasi masalah stunting dengan melibatkan keluarga dalam program-program kesehatan. Upaya ini mencakup penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, dan pembinaan pola asuh yang baik bagi anak-anak, dengan tujuan memastikan tumbuh kembang anak yang optimal sejak dini. Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga menjadi fokus melalui program urban farming yang dilaksanakan di Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo. Program ini melibatkan ibu-ibu rumah tangga dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam tanaman hortikultura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan menambah pendapatan melalui hasil pertanian organik.

PKK Kota Yogyakarta juga fokus pada pengelolaan sampah dan lingkungan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah dan mengolahnya menjadi barang berguna. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan.

Dalam upaya pemberdayaan perempuan, PKK berkolaborasi dengan Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada (UGM) di Kelurahan Sorosutan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam

pengelolaan lingkungan. Program ini mencakup pelatihan penanaman tanaman, pengelolaan sampah, dan peningkatan peran perempuan dalam menjaga lingkungan sekitar. Di sisi lain, TP PKK DIY juga berinisiatif untuk meningkatkan kesehatan mental perempuan dengan menggelar Festival Mbok Mlayu 2025, sebuah ajang lari yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik perempuan melalui interaksi sosial dan gaya hidup sehat. Acara ini diharapkan menjadi platform bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain. Melalui berbagai program tersebut, PKK Kota Yogyakarta berupaya untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing, serta berkontribusi pada pembangunan kota yang berkelanjutan.

Wilson Dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati atau partisipasi masyarakat.
- 2) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang

dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan (Totok Mardikanteo & Poerwoko Soebianto, 2013).

Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Volume 2 – Nomor 2, November 2015, (226 - 238) Aspek-aspek pemberdayaan (empowerment) meliputi fisik, intelektual, ekonomi, politik, dan kultural, dengan demikian pemberdayaan itu mencakup pengembangan kemanusiaan secara total (*total human development*). Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan adalah ketidakadilan gender yang mendorong terpuruknya peran dan posisi perempuan di masyarakat. Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menghadirkan ketidakadilan gender. Dengan keadaan perempuan yang seperti sudah dijelaskan di atas maka muncullah istilah pemberdayaan perempuan yang merupakan suatu upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya. Pemberdayaan perempuan sangatlah penting, karena keberadaan perempuan perlu dihargai hak azasinya sebagai perempuan, dikernbangkannya kesetaraan dan keadilan gender, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan sosial politik dan ekonomi yang seimbang, serta

perlunya pembangunan sosial budaya yang non diskriminatif.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya yakni masyarakat yang memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Ibit:60).

Gerakan PKK mempunyai tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Gerakan PKK dituntut untuk menata diri, meningkatkan kualitas kinerjanya agar lebih profesional. Kenyataan yang harus dihadapi dalam pembangunan yang semakin berkembang, dan salah satu kegiatannya adalah menumbuhkan kembangkan usaha peningkatan ekonomi keluarga dari berbagai aspek. Dengan peningkatan ekonomi keluarga, tentunya sangat berpengaruh untuk mendukung dan menunjang harapan keluarga menuju keluarga yang mandiri dan sejahtera. Semakin banyaknya kegiatan PKK yang perlu dan harus diselenggarakan sesuai dengan keadaan, membawa konsekuensi terhadap perlunya dan

pentingnya upaya dalam meningkatkan perekonomian keluarga (Buku catatan PKK Pusat, 2019:3).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah: 1) Gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Mendukung gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga perlu diberikan landasan hukum untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan kemampuan dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil; 2) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga; 3) Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat dan 4) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, terdapat lima tingkat pemerataan, yaitu: *Pertama*, pemerataan tingkat kesejahteraan.

Kedua, pemerataan akses. *Ketiga*, pemerataan kesadaran. *Keempat*, pemerataan partisipasi. *Kelima*, pemerataan penguasaan Kontrol atau penguasaan perempuan terhadap pengambilan keputusan ini seringkali mengalami hambatan bukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan perempuan itu mengambil keputusan, tetapi hegemoni budaya seringkali menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan (Saptandari, 1999:35-36).

Menurut Jim Ife (2008:510), terdapat tiga strategi dalam mencapai pemberdayaan, yaitu: *Pertama*, pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan. *Kedua*, pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik menekankan pentingnya perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran.

Adapun model pemberdayaan PKK, yaitu: *Pertama*, penyadaran. Organisasi PKK harus memberikan motivasi kepada kaum perempuan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. *Kedua*, pengkapasitasan. Pengkapasitasan terdiri dari tiga jenis yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.

Ketiga, pendayaan. Pendayaan dilakukan dengan memberikan daya atau kekuatan, kekuasaan, otoritas atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007).

b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang sudah begitu melembaga baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa (Indarwati, 2017:864).

Pada awalnya, organisasi ini diberi nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang di dalamnya menekankan partisipasi perempuan dan merupakan program pendidikan perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu, organisasi ini berubah nama menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (Haniz dan Marzaman, 2019:124).

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan supaya melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik. Selain itu, PKK diharapkan mampu membebaskan perempuan dari budaya patriarki. Dengan demikian, PKK diharapkan mampu untuk menghadirkan kemandirian serta mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai bagian dari keluarga (Pontoh, 2013).

Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kewenangan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) bisa terbilang cukup luas. jadi, pada dasarnya organisasi PKK merupakan organisasi yang dibentuk untuk mendukung dan membantu program-

program pemerintah. Bentuk dukungan dan bantuan itu berupa menyuplai data beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, data ibu hamil, bayi, balita, kelahiran, kematian sampai pada kegiatan masyarakat (Hanis dan Marzaman, 2019:125).

Penelitian ini mengarahkan perhatian pada upaya pengarusutamaan gender melalui pengakuan akan hak politik, ekonomi, sosial kaum perempuan. Pengorganisasian perempuan merupakan salah satu upaya jangka pendek untuk melawan ketidakadilan gender. Pengorganisasian dianggap sebagai langkah paling konkret untuk memberdayakan perempuan secara lebih baik.

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan suatu wadah yang dibentuk untuk mengakomodasi kaum perempuan sehingga memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan desa. Selain itu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan bentuk perkumpulan ibu-ibu untuk menampung aspirasi kaum perempuan.

Sementara itu, PKK mempunyai tiga fungsi, yaitu: (a) sebagai alat kontrol negara terhadap berbagai segmen masyarakat; (b) sebagai kepanjangan tangan negara untuk melayani masyarakat karena keterbatasan kemampuan negara; dan (c) sebagai wadah penyaluran kepentingan dan aktivitas berbagai segmen masyarakat. Dengan demikian, institusi-institusi ini menjadi penerima manfaat dari program pemerintah (Sutoro Eko, 2015:82-83).

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan wadah membina keluarga bermasyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera yang mandiri dengan meningkatkan mental spiritual perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila. Serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung. Dalam melakukan kegiatan tersebut perlu adanya pengelolaan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-program, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat (Sutedjo, 2006). Peranan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan segala macam tindakan yang dilakukan melalui berbagai macam kegiatan keterampilan yang banyak dilakukan. Peran pembinaan kesejahteraan keluarga sangat penting bagi pemerintah karena merupakan penengah utama antara negara dan wanita desa. Pada peranan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tersebut sejalan dengan visi dan misi PKK, dan didukung dengan sepuluh program pokok yang dimiliki PKK, kemudian lebih dikenal sebagai “Sepuluh Program Pokok PKK”. Kesepuluh program pokok tersebut adalah: a) Penghayatan dan pengamalan Pancasila; b) Gotong royong; c) Pangan; d) Sandang; e) Penghayatan dan pengamalan Pancasila; f) Pendidikan dan ketrampilan; g) Kesehatan; h) Pengembangan kehidupan koperasi; i) Kelestarian lingkungan hidup; j) Perencanaan sehat. Dengan sepuluh

program pokok PKK tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa PKK memiliki agenda dan tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin mencapai kemajuan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi dambaan setiap keluarga.

c. Konsep Masyarakat Perkotaan

Memberdayakan masyarakat mengandung arti mengembangkan, memandirikan dan memperkuat posisi masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pengembangan merupakan upaya mendorong terjadinya perubahan sosial yang sistematis, terencana, dan terkontrol. Perencanaan dan pengawasan yang teratur menjadi cara pendekatan untuk menggerakkan masyarakat agar terjadinya perubahan kearah perbaikan taraf hidupnya. Perubahan sosial tersebut meliputi segi kehidupan yang intrinsik dan ekstrinsik. Nilai sosial dan budaya sebagai intrinsik benar-benar dijunjung tinggi dan dihormati sedang hal-hal baru sebagai hal yang ekstrinsik perlu disaring dan diserap untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan. Hal tersebut berguna atau bermanfaat bagi kehidupan yang menjunjung tinggi harkat sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Berdasarkan beberapa hal diatas dapat dimaknai bahwa setelah munculnya

kesadaran atau potensi dan kemampuan untuk meningkatkan derajat maka tumbuhlah semangat untuk melakukan Perubahan ini adalah sebuah proses sekaligus sebuah tujuan.

Masyarakat perkotaan sering diidentikkan dengan masyarakat modern (maju) dan tidak jarang pula dipertentangkan dengan masyarakat pedesaan yang akrab dengan sebutan masyarakat tradisional terutama dilihat dari aspek kulturenya. Adapun ciri-ciri sebuah masyarakat modern (maju) antarlain; (1) hubungan antara sesama nyaris hanya didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan pribadi; (2) hubungan dengan masyarakat lain berlangsung secara terbuka dan saling mempengaruhi; (3) mereka yakin bahwa iptek memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya; (4) masyarakat kota berdiferensiasi atas dasar perbedaan profesi dan keahlian sebagai fungsi pendidikan serta pelatihan; (5) tingkat pendidikan masyarakat kota relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan; (6) aturan aturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat perkotaan lebih berorientasi pada aturan atau hukum formal yang bersifat kompleks; (7) tata ekonomi yang berlaku bagi masyarakat kota umumnya ekonomi-pasar yang berorientasi pada nilai uang, persaingan, dan nilai-nilai inovatif lainnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017)

Metode penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi dengan memahami perilaku individu maupun kelompok dan menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian ini membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang bersifat sementara, mengumpulkan data lewat pengaturan partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema yang diangkat, dan selanjutnya memberikan interpretasi makna dari suatu data (Creswell dalam Sugiyono, 2017)

2. Unit Analisis

Menurut Morissan (2017:166) unit analisis merupakan seluruh hal yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan secara ringkas mengenai keseluruhan unit yang dianalisis. Dalam penelitian ini terdapat unit yang diperlukan penulis sebagai alat penunjang selama melakukan penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kelurahan Muja Muju dan Ibu-ibu PKK.

Subjek penelitian dalam studi ini sering disebut sebagai informan. Informan adalah individu yang memberikan informasi mengenai kondisi dan situasi yang relevan dengan latar penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu pemilihan informan dengan ditentukan secara langsung, karena informan tersebut terlibat dalam masalah yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta mampu menyampaikan informasi sesuai dengan situasi dan kondisi latar penelitian (Sugiyono, 2018). Dengan demikian, informan yang dipilih adalah mereka yang dapat memberikan informasi yang mendalam dan sesuai dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai 9 informan, yakni Bapak Lurah Kelurahan Muja Muju, Sekretaris Lurah Kelurahan Muja Muju, Ketua PKK Kelurahan Muja Muju, Wakil Ketua PKK, Ketua Pokja I, Anggota Pokja I, Sekretris Ketua Pokja I, Ketua Pokja II, dan Ketua Pokja III.

Berikut ini akan dideskripsikan informan berdasarkan nama, tingkat pendidikan, jabatan/pekerjaan, usia dan jenis kelamin yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang keadaan informan penelitian.

Tabel 1. 1 Data Informan

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Usia
1	Aris Sukrisna A.Md	Lurah Muja Muju	S1	L	52
2	Ana Pertiwi	Ketua Pokja II	SLTA	P	36
3	Adiwibowo A.Md	Sekretaris Lurah	S1	L	40
4	Kumala Ratna A.Md	Ketua PKK	S1	P	38
5	Sriningsih	Sekretaris Pokja II	SLTA	P	34
6	Hinaya	Ketua Pokja III	SLTA	P	32
7	Nurhayati	Anggota Pokja I	SLTA	P	32
8	Sriyanti	Ketua Pokja I	SLTA	P	31
9	Juwariyah	Wakil Ketua PKK	SLTA	P	30

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan 4 metode yaitu:

a. Observasi

Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2017), observasi adalah proses di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati aktivitas individu secara langsung di lokasi penelitian. Dalam observasi ini, digunakan metode pengamatan langsung terhadap suatu objek, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Pengumpulan data dilakukan melalui indra peneliti dan diikuti dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Observasi sering dilakukan ketika informasi tentang masalah yang sedang diteliti masih terbatas. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah tersebut, serta

kemungkinan petunjuk untuk menemukan solusi atau pemecahan terhadap masalah yang diteliti.

Dalam observasi, peneliti mengamati bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh organisasi PKK di Kelurahan Muja Muju. Salah satu temuan penting adalah masih rendahnya rasa percaya diri perempuan dalam menyuarakan dan mengartikulasikan kepentingan mereka sendiri. Selain itu, ditemukan pula adanya kecenderungan eksklusi sosial di antara sesama perempuan, yang menghambat terciptanya solidaritas kolektif dalam organisasi.

Peneliti juga mencatat bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender masih belum merata. Hal ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi mengenai pengarusutamaan gender yang seharusnya menjadi bagian penting dari agenda pemberdayaan perempuan. Meskipun PKK secara rutin mengadakan sosialisasi dan workshop bertema kesetaraan gender, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan, karena masih banyak masyarakat yang memandang peran perempuan hanya terbatas pada ranah domestik.

Secara kelembagaan, PKK di Kelurahan Muja Muju juga menghadapi tantangan dalam hal kemandirian organisasi. PKK terbentuk bukan atas inisiatif murni dari perempuan di wilayah tersebut, melainkan sebagai hasil pembentukan oleh Pemerintah Kelurahan. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait rasa kepemilikan dan inisiatif dari anggota, yang pada akhirnya berdampak

pada efektivitas program-program yang dijalankan. Di sisi lain, PKK juga masih menghadapi berbagai bentuk stereotip dan diskriminasi dari masyarakat yang memegang pandangan tradisional terhadap peran perempuan. Pandangan ini menjadi salah satu hambatan dalam mengoptimalkan peran perempuan di ranah publik. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun kapasitas anggota, juga menjadi tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan program-program PKK.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat membangun pemahaman mengenai suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti mengkombinasikan dua jenis wawancara, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) dan wawancara terarah (Kriyantono, 2020). Wawancara mendalam dilakukan dengan cara tanya jawab yang lebih bebas, tanpa mengikuti pedoman pertanyaan yang ketat. Sementara itu, wawancara terarah dilakukan dengan menanyakan hal-hal yang telah dipersiapkan sebelumnya, berdasarkan pedoman atau daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data atau informasi langsung dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, melalui proses tanya

jawab. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih mendalam dari informan yang relevan, dengan tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebagai acuan dalam penelitian.

Peneliti melakukan persiapan sebelum melakukan wawancara dengan anggota PKK. Peneliti juga mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden atau informan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota PKK di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan wawancara dengan anggota PKK dan Pemerintah Kelurahan Muja Muju. Setelah mempersiapkan kesiapan dari peneliti. Peneliti melaksanakan wawancara dengan anggota PKK untuk memahami lebih lanjut tentang stereotip yang masih ada di kalangan masyarakat terkait peran perempuan dan PKK. Selain tentang stereotip ini, peneliti juga mewawancarai tentang sumber daya yang dibutuhkan oleh PKK untuk menjalankan kegiatan di kelurahan. Dari beberapa hasil yang peneliti dapatkan di lapangan, peneliti ingin mengetahui bagaimana anggota PKK mengatasi stereotip tersebut dan bagaimana juga PKK memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan kegiatan PKK di Kelurahan Muja Muju. Selain itu, PKK juga ingin mengetahui tentang keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan dan strategi apa saja yang mereka lakukan untuk meningkatkan

keterlibatan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti otentik yang digunakan oleh peneliti dengan memanfaatkan alat yang tersedia untuk mengumpulkan data yang diperlukan secara memadai. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, seperti gambaran umum Kalurahan Widodomartani, sejarahnya yang tercatat dalam profil Kalurahan, kebijakan-kebijakan yang berlaku, serta dokumen berupa gambar, seperti foto. Hasil dokumentasi yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk melengkapi data yang sudah diperoleh melalui metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2017).

Dokumen utama yang peneliti dapatkan yaitu catatan lapangan yang berisi tentang observasi dan pengamatan wawancara. Lalu catatan yang berisi pertanyaan dan jawaban responden. Dokumen yang berisi foto yang diambil selama wawancara untuk mendukung data yang diperoleh. Kemudian terkait dokumen yang berisi informasi tentang informan mulai dari nama, usia, dan jabatan/pekerjaan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif menurut Moleong (2007). Data yang diperoleh dalam bentuk ucapan dan tulisan akan diolah dengan cara mengungkapkannya

dalam kata-kata atau kalimat, serta mengklasifikasikan seluruh data dan menghubungkan aspek-aspek yang relevan. Selanjutnya, dalam proses analisis data penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan kerangka analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing atau verification).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007:333-345). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007:204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan

gambaran lebih jelas mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dicatat dalam catatan lapangan, kemudian dianalisis, dideskripsikan, dan direfleksikan (Sugiyono, 2016)

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah hasil dari proses reduksi yang disusun dalam laporan secara sistematis, sehingga mudah dibaca dan dipahami, baik secara keseluruhan maupun dalam bagian-bagiannya, dan membentuk suatu kesatuan yang utuh (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan menyajikan kutipan langsung dari informan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam penarikan kesimpulan adalah mengambil data yang diperoleh dari penelitian. Proses ini melibatkan analisis data, penghubungan data dengan teori yang relevan, dan pengkajian data.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti *persistent observation* (observasi berlanjut), *triangulasi*, maupun *peerderieting* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi) (Moleong, 2012:330).

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu sendiri. Adapun langkah operasionalnya dapat dilakukan sebagai berikut. (Moleong, 2012:330). :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara;
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa dikatakan secara pribadi;
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian; dan

Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai kalangan seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan (Moleong, 2012:330)

BAB II

PROFIL KELURAHAN MUJA MUJU

A. Sejarah Kelurahan

Pada mulanya Kelurahan Muja Muju adalah salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah administratif Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. Kelurahan Muja Muju terbentuk pada tahun 1981, dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1981 tentang pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan di Provinsi DIY.

Dalam melaksanakan ketetapan mengenai demokrasi, pemerintahan Desa dengan menggabungkan beberapa Kelurahan lama menjadi satu, wilayah Kapanewon Kotagede Yogyakarta dari 13 Kelurahan Lama akan dijadikan 3 Kelurahan Gabungan. Lima Kelurahan yang ada di sebelah barat sungai Gajah-wong digabungkan menjadi satu seperti diuraikan diatas. Pelaksanaan penggabungan lima Kelurahan tersebut dimulai dengan pembentukan Panitia Pelaksanaan yang anggota-anggotanya diambilkan dari tokoh-tokoh setempat. Untuk penggabungan 5 Kelurahan di sebelah barat sungai Gajah-wong ini Panitia Pelaksanaannya diketuai oleh Sdr. Mujiharto.

Pembentukan Kelurahan Gabungan ditandai dengan pembentuk dan pemilihan anggota pamong Kelurahan yang baru, dan tata cara pelaksanaannya ditentukan sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia Pelaksana diambilkan dari anggota masyarakat di masing-masing Kelurahan Lama, dipimpin oleh Panewu Pamong Praja. Pada saat itu yang menjabat Panewu Pamong Praja Kotagede

Yogyakarta adalah R.P. Prodi Adisuryo. Pada sekitar bulan November 1946 Panitia Pelaksana terbentuk dan diketuai oleh Sdr. Mujiharto.

2. Pada Bulan November dan awal Desember 1946 diselenggarakan Rapat Kelurahan di lima kelurahan. Dalam Rapat Kelurahan ini kecuali memilih bakal Calon Pamong, juga memilih perwakilan yang akan hadir pada Rapat Pemilihan Pamong, dengan ketentuan setiap 10 Kepala keluarga diwakili oleh seorang.
3. Semula ditetapkan bahwa hari pemilihan Pamong Kelurahan pada hari Minggu Wage tanggal 22 Desember 1946, tetapi karena sesuatu hal termasuk kurang persiapan Panitia Pelaksana, maka akhirnya hari pemilihan diundur jatuh pada hari Minggu Legi tanggal 20 Desember 1946. Pemilihan dilaksanakan di Pendopo Kapanewon Kotagede Yogyakarta, di Basen. (tempat tersebut dimana Pendopo dan Rumah-Dinas Panewu Pamong Praja dibumihanguskan pada clash ke II, sekarang ditempati untuk Rumah gadai Negeri Basen). Pimpinan Rapat langsung dipegang Bupati Bantul KRT. Djojodiningrat.

B. Visi Misi Kelurahan Muja Muju

Pemerintah Kelurahan Muja Muju memiliki visi dan misi yang sudah disepakati Pemerintah Kelurahan bersama masyarakat. Adapun visi dan misi Kelurahan Pandowoharjo adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Kelurahan Muja Muju: “Menjaga dan memantapkan predikat Muja Muju sebagai Kelurahan Mandiri Budaya dengan perencanaan yang jelas (sukses *by design*), *Run by system* dan *rule of the law* dalam rangka percepatan Muja Muju menuju Kelurahan mandiri yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan berwawasan lingkungan serta menjunjung tinggi kearifan lokal”

2. Misi

Misi Kelurahan Muja Muju:

- a. Meningkatkan kapasitas pengelolaan PKK dalam melakukan administrasi;
- b. Meningkatkan program akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK Muja Muju;
- c. Meningkatkan Muja Muju sebagai salah satu tujuan wisata; dan
- d. Meningkatkan channeling dengan konsep A (dengan *Akademisi*), B (dengan *Bisnisman*), C (dengan *Community*), G (dengan *Government*).

C. Kondisi Geografi Kelurahan Muja Muju

Batas Administrasi Kelurahan Muja Muju terletak di wilayah Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Bagian Utara : Kelurahan Baciro, Gondokusuman
2. Bagian Selatan : Kelurahan Warungboto, Umbulharjo
3. Bagian Timur : Kelurahan Rojowingun, Kotagede
4. Bagian Barat : Kelurahan Semaki, Umbulharjo

D. Kondisi Demografi Kelurahan Muja Muju

Berdasarkan data kependudukan di Kelurahan Muja Muju, data-data kependudukan yang meliputi penduduk berdasarkan; jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk berdasarkan agama.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	5.511
2	Perempuan	5.752
Jumlah		11.263 Jiwa

Sumber: Data Primer (Data Observasi)

Berdasarkan data administrasi kependudukan tahun 2023-2025, Kelurahan Muja Muju dihuni 11.263 Jiwa penduduk. Dengan rincian 5.511 jiwa laki-laki dan 5.752 jiwa perempuan.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	351
2	Pegawai Negeri	8
3	ABRI	35
4	Tani	4
5	Buruh Tani	14
6	Pensiunan	290
7	Pertukangan	31
8	Wiraswasta/Pedagang	1270
9	Jasa	142
10	Swasta	2427
Jumlah		4.572

Sumber: Data Primer (Data Observasi)

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Taman Kanak-Kanak	-
2	Tamat SD	988 orang
3	Tamat SLTP	1116 orang
4	Tamat SLTA	2804 orang
6	Tamat D1 – D3	621 orang
7	Sarjana (S-1)	2097 orang
8	Magister S-2	331 orang
Jumlah		7.957 orang

Sumber: Data Primer (Data Observasi)

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Pemeluk Agama	Jumlah
1	Islam	11.138
2	Kristen	338
3	Katolik	1.223
4	Hindu	11
5	Budha	6

Sumber: Data Primer (Data Observasi)

Berdasarkan data dari tabel 3 di atas, menunjukkan penduduk yang beragama Islam lebih dominan dengan jumlah 11.138 orang.

5. Sarana dan Prasarana Kelurahan Muja Muju

a. Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kelurahan Muja Muju memiliki sarana dan prasarana pemerintahan untuk mendukung kerja pemerintah Kelurahan Muja

Muju. Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana

No	Nama	Jumlah (Unit/Buah)
1.	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	1
2.	Tempat pengelolaan sampah	5
3.	Penyediaan air bersih	20
4.	Instalasi pengolahan air limbah	3
5.	Bina Keluarga Balita (BKB)	1
6.	Bina Keluarga Lansia (BKL)	1
7.	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1
8.	Sekretariat Kampung KB	1

Sumber: Data Primer (Data Observasi)

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa sarana prasarana Pemerintah Kelurahan Muja Muju cukup memadai hal ini diharapkan dapat mendukung aparat kelurahan dalam bekerja memaksimalkan dan melayani masyarakat khususnya masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

1) Sarana Pendidikan

Untuk mendukung pendidikan masyarakat, Kelurahan Muja Muju memiliki prasarana pendidikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Prasarana Pendidikan

No.	Nama	Jumlah (Uni/Buah)
1.	Gedung SD	4
2.	Gedung SMP	2
3.	Gedung SMA	3
4.	Gedung TK	5
5	Gedung PT	3

Sumber: Data Primer (Data Observasi)

Fasilitas pendidikan di Kelurahan Muja Muju cukup memadai

mulai dari PAUD, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Gedung PT.

2) Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK merupakan suatu program untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperbaiki kesejahteraan, serta mengembangkan potensi masyarakat. Program PKK di Kelurahan Muja Muju bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola dan anggota PKK dalam menyelenggarakan program pemberdayaan keluarga yang efektif dan efisien.

Selain itu, program kesejahteraan keluarga (PKK) di Kelurahan Muja Muju bertujuan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerja sama antar anggota PKK untuk memudahkan koordinasi dalam melaksanakan program-program pemberdayaan keluarga.

6. Institusi/Kelembagaan Kelurahan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan menyebutkan bahwa aktivitas dan dinamika masyarakat terwadahi dalam tiga institusi/lembaga utama dan kedudukan sebagai mitra kerja. Sehingga sinergitas atau keterpaduan ketiga lembaga ini sangat dibutuhkan guna pemanfaatan institusi kelurahan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat serta untuk mewujudkan kemandirian desa, baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perubahan kualitas masyarakat. Ketiga

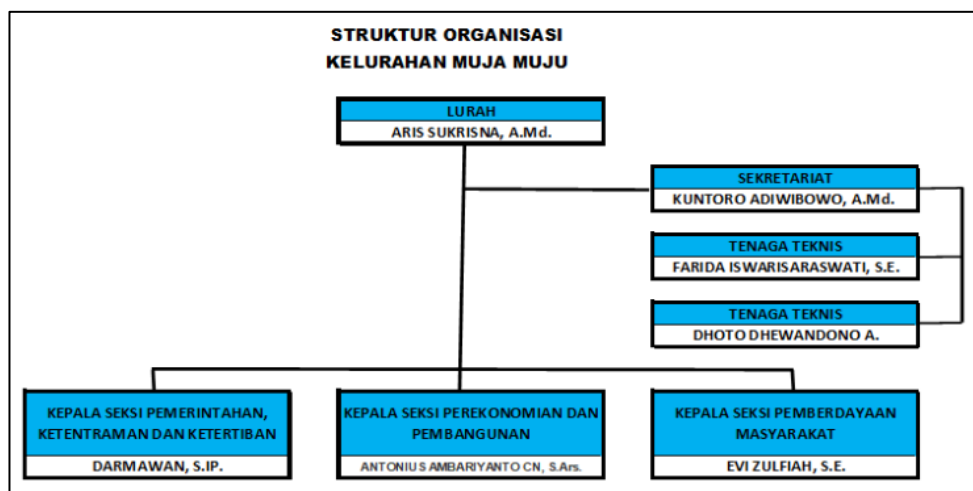
institusi tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Pemerintah Kelurahan

Pemerintah Kelurahan adalah perangkat daerah kecamatan yang dipimpin oleh lurah. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil di bawah Kecamatan. Yang memiliki tugas dan fungsi sebagai; melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; melaksanakan pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh walikota; mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Muja Muju:

Gambar 2. 1 Struktur Pemerintah Kelurahan Muja Muju



Sumber: Dok Profil Kelurahan Muja Muju 2024

Dari bagan struktur organisasi Kelurahan Muja Muju di atas, dapat kita lihat komposisi perangkat yang sangat seimbang.

b. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk atas Prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat, sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Adapun Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kelurahan Muja Muju adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

No.	Nama Lembaga	Jumlah Anggota	Jumlah Pengurus (Orang)
1.	Pengurus RW	67	23
2.	Pengurus RT	68	47
3.	TP PKK Kelurahan	12	12
4.	Pengurus PKK RW	55	55
5.	Pengurus PKK RT	12	12
6	Petugas Linmas	5	3
7	Pengurus LPMK	13	17

Sumber: Data Primer (Data Observasi)

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kelurahan Muja Muju sangat lengkap dalam hal ini, dalam menjalankan tugasnya sebagai penampung aspirasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat.

c. Tim Penggerak (PKK)

Tabel 2. 8 Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)

No.	Nama	Jabatan
1.	Kumala Ratna, A.Md.	Ketua
2.	Juwariyah	Wakil Ketua
3.	Susant, S.Pd	Sekretaris
4.	Astuti, A.Md	Bendahara
5.	Sriyanti	Ketua Pokja I
6	Lasmini	Wakil Pokja I
7.	Widya	Sekretaris Pokja I
8.	Nurhayati, Wardini, Siti	Anggota
9.	Ana Pertiwi	Ketua Pokja II
10	Latifah	Wakil Ketua Pokja II
11	Sriningsih	Sekretaris Pokja II
12	Sriyatuh, Kumala,Suding	Anggota
13	Hinaya	Ketua Pokja III
14	Lufifah	Wakil Ketua
15	Katarina, Alifah, Aini	Anggota
16	Hanani	Ketua Pokja IV
17	Mirna	Wakil Ketua
18	Hasiyah	Sekretaris
19	Handayani, Irawati, Sulistyani	Anggota

Sumber: data primer (data observasi)

Kegiatan Tim Penggerak PKK Kelurahan Muja Muju dalam melaksanakan program sudah lebih baik dimana pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan program kerja Tim Penggerak PKK Kelurahan Muja Muju.

Adapun tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK Kelurahan Muja

Muju yang telah dicantumkan dalam buku Profil PKK Kelurahan Muja Muju, antara lain :

- 1) Menyusun rencana kerja/program kerja
- 2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah disusun
- 3) Menggerakan kelompok PKK yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga
- 4) Melaksanakan kegiatan yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, memberikan petunjuk dan sebagainya dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga
- 5) Melaksanakan tertib administrasi agar tetap bersifat akuntabel dan efisiensi.

Beberapa program PKK pada tahun 2023-2024, yang meliputi:

- 1) Mengadakan pertemuan pengurus setiap sebulan sekali;
- 2) Mengadakan pertemuan rutin anggota dan pengurus setiap tanggal 14;
- 3) Menerima dan mendistribusikan surat masuk dan keluar setiap bulan;
- 4) Membuat laporan pada bulan Desember;
- 5) Mengerjakan administrasi setiap akhir bulan;
- 6) Menyusun laporan keuangan setiap bulan desember;
- 7) Pembinaan simulasi dalam pertemuan PKK;
- 8) Pembinaan perlindungan anak dan dalam pertemuan kader balita;

- 9) Kerja bakti lingkungan setiap seminggu sekali;
- 10) Pembinaan rukun kematin dalam pertemuan lansia;
- 11) Pelatihan dan pertemuan BKB setiap bulan tanggal 19 dan;
- 12) Pengelolaan sampah bulan November.

BAB III

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI

PERKOTAAN

Pada tahap ini penulis akan menguraikan hasil penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi kedalam bentuk analisis data, sehingga dapat menyimpulkan dan mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di perkotaan.

A. Analisis Data

1. Komunikasi dalam pelaksanaan PKK

Komunikasi yang dimaksud yaitu implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Komunikasi dalam pelaksanaan PKK bertujuan untuk meningkatkan Koordinasi dan kerjasama antara pengurus PKK, Kader PKK, dan warga masyarakat. Selain itu, komunikasi yang efektif juga dapat, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program PKK, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi program PKK. Dalam pelaksanaan PKK, komunikasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan program PKK. Oleh karena itu, pengurus PKK dan kader PKK harus memiliki

kemampuan komunikasi yang baik untuk dapat berkomunikasi dengan efektif.

Berikut adalah hasil wawancara bersama Bapak Aris Sukrisna, A.Md selaku Bapak Lurah Kelurahan Muja Muju yang menyampaikan bahwa:

Menurut informan, salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program PKK di tingkat kelurahan adalah persoalan komunikasi dan penyampaian informasi. “Kami merasa akses informasi tentang program PKK masih menjadi salah satu faktor penghambat, mbak. Masyarakat itu belum semua tahu atau paham tentang program-program PKK yang sebenarnya bisa sangat bermanfaat,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa meskipun saat ini akses terhadap program PKK sudah lebih terbuka karena adanya alokasi kegiatan yang jelas, masih banyak warga yang belum terjangkau oleh informasi tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang sudah dirancang.

Sebagai solusi, pihak kelurahan bersama PKK berusaha mengatasi kendala komunikasi ini melalui berbagai cara. “Kami sering melakukan sosialisasi dan workshop, baik secara langsung lewat pertemuan warga maupun lewat media sosial, mbak. Kami juga libatkan tokoh masyarakat dan ulama supaya pesan-pesan tentang pentingnya PKK bisa lebih diterima dan dimengerti oleh masyarakat luas,” jelasnya.

Ia berharap, dengan upaya komunikasi yang lebih aktif dan terbuka, masyarakat dapat lebih memahami peran penting PKK dan bersedia ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang dijalankan. “Harapan kami, mbak, masyarakat bisa merasa lebih dekat dan ikut menjadi bagian dari gerakan PKK, bukan hanya tahu namanya saja,” tutupnya. (Selasa, 21/12/2024)

Dari yang disampaikan oleh Bapak Lurah Kelurahan Muja Muju diatas menunjukkan bahwa akses (access) berarti ruang atau kapasitas PKK untuk masuk dalam area Governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Bentuk implementasi kebijakan pemerintah Kelurahan Muja Muju dalam

pelaksanaan program PKK di perkotaan telah mengalami beberapa perubahan yang signifikan. Perubahan-perubahan ini telah membantu meningkatkan program PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program PKK, seperti kurangnya partisipasi masyarakat. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perubahan kebijakan pemerintah pada pelaksanaan program PKK untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pelaksanaan PKK di Kelurahan Muja Muju.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ketua Pokja II yang menyampaikan bahwa:

“Komunikasi dalam PKK itu sangat penting sekali mbak di Kelurahan Muja Muju. Karna komunikasi ini menyampaikan informasi-informasi penting tentang kegiatan PKK terhadap masyarakat. Kita harus berkomunikasi dengan baik agar masyarakat dapat memahami tentang kegiatan PKK dan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut”.

Dari yang disampaikan oleh ketua Pokja II di atas menunjukan bahwa dalam kegiatan PKK di Kelurahan Muja Muju komunikasi dalam kegiatan PKK sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan PKK dan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan komunikasi yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami tentang kegiatan PKK dan dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dan dalam pelaksanaan PKK, komunikasi yang efektif juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PKK. Dengan komunikasi yang efektif,

masyarakat dapat lebih percaya diri dalam berpartisipasi.

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan; komunikasi dalam pelaksanaan PKK itu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan PKK dan manfaatnya bagi masyarakat. Lalu dengan akses yang mudah, masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam kegiatan PKK. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PKK, komunikasi yang efektif dan akses masyarakat yang mudah sangat penting untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

2. Sumberdaya Pelaksanaan PKK

Sumberdaya pelaksana PKK merupakan salah satu komponen penting pada pelaksanaan PKK. Sumberdaya dimaksud dalam pelaksanaan PKK meliputi: sumberdaya manusia, yaitu pengurus PKK dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan PKK. Lalu sumberdaya keuangan, yaitu dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pelaksanaan PKK. Berikutnya, sumberdaya sarana prasarana, yaitu fasilitas serta peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan PKK seperti ruang pertemuan dan peralatan lainnya dalam PKK.

Berkaitan dengan itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kuntoro Adiwibowo A.Md selaku Sekretaris Kelurahan Muja Muju yang menyampaikan bahwa:

“Kami merasa informasi tentang program PKK itu belum tersampaikan dengan baik, mbak. Banyak warga yang belum tahu programnya apa saja, padahal manfaatnya besar untuk keluarga dan lingkungan, Kami coba sampaikan lewat pertemuan warga,

media sosial, dan juga mengundang tokoh masyarakat serta ulama supaya masyarakat lebih paham dan ikut peduli. Untuk SDM-nya sebenarnya sudah cukup bagus, mbak. Banyak ibu-ibu yang semangat dan punya kapasitas. Tapi memang mereka masih butuh bimbingan dan motivasi supaya percaya diri untuk aktif di kegiatan PKK. Kami ingin perempuan di sini tidak hanya aktif di rumah, tapi juga bisa berkontribusi di masyarakat, Sudah ada alokasi anggaran yang berkaitan dengan kegiatan PKK, mbak. Itu berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak,” katanya. Kami dari kelurahan ingin terus mendorong PKK agar bisa jadi motor penggerak pembangunan berbasis keluarga. Harapannya, masyarakat lebih paham, lebih aktif, dan sama-sama ikut membangun kelurahan kita”.

Dari yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris di atas dapat menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran dana dalam program pemberdayaan PKK di Kelurahan Muja Muju berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada kesulitan dalam mengakses sumber daya. Kegiatan PKK dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat membantu di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Adanya anggaran dana tersebut dapat mengembangkan kapasitas dalam melaksanakan program pemberdayaan PKK sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun dengan adanya alokasi anggaran dana untuk program pemberdayaan PKK dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan di atas juga dapat diketahui bahwa sebagai bentuk tindak lanjut komitmen terhadap pengarusutamaan gender, pemerintah

Kelurahan Muja Muju melakukan redistribusi sumber daya berupa dana kepada PKK. Dalam konteks *Governing*, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, penganggaran, dan menjalankan pembangunan atau pelayanan serta menyelesaikan masalah yang muncul. Selain melakukan distribusi sumber daya berupa anggaran, pemerintah Kelurahan Muja Muju juga berupaya untuk memfasilitasi PKK dengan berbagai peralatan dan sarana prasarana.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Ibu Kumala Ratna A.Md selaku Ketua PKK kelurahan Muja Muju yang menyampaikan bahwa:

“Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kepala Lurah sendiri mbak kami juga diberi fasilitas berupa ruang PKK dan honor kader. Ruang PKK merupakan tempat yang akan digunakan PKK untuk berkumpul, berdiskusi, konsolidasi, dan melaksanakan kegiatan yang dapat menunjang mereka untuk terlibat dalam penyelenggaraan PKK. Sedangkan honor kader itu penghargaan yang kami sediakan terhadap anggota PKK yang telah berkontribusi dalam kegiatan PKK. Kalau honor kader itu sendiri berupa uang tunai maupun barang mbak. Honor kader itu ada karena sangat membantu meningkatkan motivasi dan semangat anggota PKK dalam melakukan kegiatan, serta memudahkan anggota PKK dalam melakukan kegiatan. Kemudian sebagian dari honor kader tersebut kami gunakan untuk membiayai kegiatan PKK Kelurahan seperti pelatihan, seminar, dan kegiatan sosial”.

Dari yang disampaikan oleh Ketua PKK di atas menunjukkan bahwa fasilitas berupa gedung dan honor kader PKK memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan PKK. Fasilitas berupa gedung PKK yang telah dibangun dengan dana dari pemerintah setempat telah memberikan kemudahan bagi anggota PKK dalam melakukan kegiatan. Gedung tersebut dilengkapi dengan ruang pertemuan, ruang pelatihan, dan ruang penyimpanan yang memadai,

sehingga dapat mendukung kegiatan PKK dengan lebih efektif. Selain itu, honor kader yang diterima oleh Ketua PKK Kelurahan juga telah memberikan motivasi dan semangat bagi anggota PKK dalam melakukan kegiatan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa, fasilitas berupa gedung dan honor kader PKK telah memberi kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi serta efektifitas kegiatan PKK. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas fasilitas berupa gedung dan honor kader PKK, sehingga dapat mendukung kegiatan PKK dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, perlu dilakukan juga evaluasi monitoring terhadap penggunaan fasilitas berupa gedung dan honor kader PKK, sehingga dapat memastikan bahwa fasilitas tersebut digunakan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa kegiatan PKK dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Ibu Sriningsih selaku Sekretaris Pokja II yang menyampaikan bahwa:

“Dari pemerintah sendiri menyediakan dana bantuan untuk mendukung kegiatan PKK, seperti untuk kegiatan pelatihan dan kegiatan lainnya. Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh PKK, mbak. Dengan menyediakan seperti ini berarti pemerintah juga berperan penting dalam mendukung kegiatan PKK. Terkait SDM, Sebenarnya SDM di PKK ini sudah lumayan bagus, mbak. Banyak ibu-ibu yang aktif, punya kemauan, dan terbuka untuk belajar. Cuma memang masih ada yang ragu-ragu untuk ikut terlibat lebih jauh karena belum percaya diri. Kalau mereka didampingi dan diberi pelatihan yang sesuai, saya yakin banyak dari mereka yang bisa jadi motor penggerak kegiatan di masyarakat. Tinggal bagaimana kita sebagai pengurus mendorong

mereka terus dan membuka ruang untuk terlibat aktif. Harapan saya dukungan anggaran dan fasilitas itu penting, tapi lebih penting lagi kalau ibu-ibu ini juga diberdayakan dari segi kemampuan dan mentalitasnya. Supaya kegiatan PKK itu nggak cuma jalan, tapi juga berdampak nyata buat masyarakat”.

Dari yang disampaikan oleh Sekretaris Pokja II di atas dapat menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai sumberdaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PKK, seperti dan bantuan, fasilitas dan peralatan. Sumberdaya yang disediakan oleh pemerintah Kelurahan Muja Muju telah membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PKK.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kelurahan Muja Muju memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan PKK, khususnya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain fasilitas fisik, pemerintah juga menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan PKK, seperti pelatihan, workshop, dan program pemberdayaan lainnya.

Tidak hanya dari aspek pendanaan dan infrastruktur, dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia juga menjadi poin penting yang diangkat oleh informan. Pemerintah dan pengurus PKK menyadari bahwa kualitas dan partisipasi aktif kader serta anggota masyarakat, khususnya kaum perempuan, menjadi kunci keberhasilan program. Banyak perempuan di wilayah ini yang memiliki potensi besar, namun

masih membutuhkan dorongan, pelatihan, serta pendampingan untuk bisa lebih percaya diri dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Dengan dukungan fasilitas, pendanaan, dan penguatan kapasitas SDM, kegiatan PKK di Kelurahan Muja Muju memiliki peluang besar untuk berkembang secara berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini diharapkan dapat memperkuat peran PKK sebagai penggerak pembangunan berbasis keluarga di tingkat lokal.

3. Disposisi Pelaksanaan PKK

Disposisi pelaksanaan PKK yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengurus PKK pada melaksanakan program dan kegiatan PKK. Dalam tahap ini, pengurus PKK menentukan tujuan dan kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini pemerintah melakukan perencanaan terkait program yang akan dilaksanakan oleh PKK supaya menyesuaikan dengan keutuhan dan potensi masyarakat kelurahan muja muju. Setelah diteliti lebih lanjut, pemerintah kelurahan melakukan pelaksanaan program. Pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh pegawai Kelurahan Muja Muju, Kader PKK, dan masyarakat Kelurahan Muja Muju. Lalu setelah melakukan pelaksanaan program, pemerintah kelurahan muja muju melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa program PKK berjalan sesuai dengan rencana. Berkaitan dengan hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Ibu Hinya selaku Ketua Pokja III yang

menyampaikan bahwa:

“Terkait dengan perencanaan program PKK di Kelurahan kami mbak, sebelumnya kami menganalisis kebutuhan dan potensi dari masyarakat. Lalu kami melakukan survei dan diskusi dengan masyarakat untuk menentukan program PKK yang akan dilaksanakan. Kemudian dari pemerintah sendiri melakukan pengalokasian dana untuk mungkin ada program pelatihan atau workshop dan pembangunan fasilitas terhadap PKK mbak”.

Dari pernyataan Ketua Pokja III menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan PKK pemerintah Kelurahan Muja Muju melakukan perencanaan yang meliputi identifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat Kelurahan Muja Muju. Lalu Pemerintah Kelurahan juga melakukan perencanaan program dan anggaran lalu yang terakhir pembentukan tim pelaksana. Selanjutnya dari pemerintah Kelurahan Muja Muju sendiri melakukan penganggaran dana untuk pelatihan pengembangan potensi anggota PKK.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu Nurhayati selaku Anggota Pokja I yang menyampaikan bahwa:

“Kami sebagai anggota PKK itu selalu sering memberikan usulan mbak terkhusus tentang dukungan untuk pemberdayaan PKK. Kami melakukan pendekatan terhadap perempuan yang ada di desa ini, serta mengundang mereka untuk bergabung dengan kegiatan PKK. Terutama untuk mengubah pandangan masyarakat tentang stereotip yang selalu menganggap kaum perempuan adalah kaum yang lemah. Kami pun berharap agar masyarakat lebih memahami kesamaan gender upaya untuk mengubah stereotip dan meningkatkan partisipasi perempuan. Kami juga mengusulkan program-program yang bersifat membangun mbak seperti contohnya memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pemberdayaan PKK”.(23/12/2024)

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat PKK Muja Muju mengusulkan

berbagai macam program yang dapat memberdayakan yaitu pembekalan dan pelatihan. Program-program ini dapat menjadikan perempuan sebagai pribadi yang mandiri. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa kegiatan PKK berorientasi pada pembangunan sosial (pembangunan non-fisik).

Hal ini menjadi penting karena selama ini pembangunan di kelurahan cenderung bias fisik. Artinya, selama ini pembangunan kelurahan menekankan pembangunan yang berbasis infrastruktur. Dengan kenyataan ini, maka kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pembangunan sangat kecil. Hal tersebut dikonfirmasi Ibu Sriyanti selaku Ketua Pokja I yang menyampaikan bahwa:

“Biasanya kita selalu mengajukan adanya pelatihan sumber daya manusia mbak. Dimana hal ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan perempuan yang ada di Kelurahan Muja Muju. Selain itu pelatihan tersebut kami ajukan guna untuk mengembangkan keterampilan PKK supaya menambah penghasilan. Kaitan dengan kegiatan itu tentunya tidak terlepas dari penggunaan dana kelurahan mbak”.(27/12/2024)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sebagai penyalur aspirasi kaum perempuan, PKK mengajukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pengkapasitas kaum perempuan kepada pemerintah Kelurahan Muja Muju. Hal ini tampak dalam usulan PKK untuk mengadakan berbagai pelatihan kepada kaum perempuan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga kaum perempuan mempunyai keterampilan dan mempunyai penghasilan sendiri. Dari pernyataan di atas juga, dapat diketahui bahwa PKK mengintervensi kebijakan ekonomi pemerintah Kelurahan Muja Muju. Hal ini tampak

dalam usulan PKK yang menginginkan agar kegiatan pelatihan dibiayai oleh dana kelurahan. Hal ini berarti PKK menginginkan adanya pemerataan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Jadi, PKK bertujuan untuk mewujudkan control dan pemerataan penguasaan sumber daya ekonomi di Kelurahan Muja Muju.

Dari hasil wawancara terhadap informan di atas terkait disposisi pelaksanaan PKK dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksanaan PKK di Kelurahan Muja Muju sangat penting untuk mencapai tujuan program PKK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Muja Muju.

4. Struktur Organisasi Pelaksanaan PKK

Struktur organisasi pelaksanaan PKK yaitu susunan dan hubungan antara berbagai unit kerja dan individu yang terlibat dalam pelaksanaan program PKK. Struktur organisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program PKK dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut hasil dari wawancara terhadap Ibu Juwariyah selaku Wakil Ketua (PKK) Kelurahan Muja Muju yang menyampaikan bahwa:

“Berkaitan dengan struktur organisasi pelaksanaan PKK di Kelurahan Muja Muju sendiri mbak terdiri dari Ketua PKK, Sekretariat PKK, ada bidang PKK, Tim Pelaksana PKK, dan Kader PKK sendiri mbak. Yang kami lihat selama ini mereka bekerja sesuai dengan unit kerja mbak, dalam hal ini adalah mereka bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. PKK di kelurahan ini melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, dan pembangunan infrastruktur”.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa di Kelurahan Muja Muju terdapat struktur yang jelas dan terstruktur. Adanya bagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara unit kerja. Kemudian ada juga koordinasi dan kerja sama antara unit kerja demi mencapai tujuan program PKK yang efektif. Organisasi pelaksanaan PKK memiliki mekanisme koordinasi dan kerja sama yang efektif antara unit kerja. Hal ini memungkinkan adanya sinergi dan keselarasan dalam pelaksanaan program PKK, sehingga tujuan program dapat tercapai.

Dari hasil wawancara terhadap informan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi pelaksanaan PKK di Kelurahan Muja Muju sangat penting karena memungkinkan pelaksanaan program PKK yang efektif dan efisien. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, koordinasi dan kerja sama antara unit kerja dan anggota masyarakat dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga meningkatkan kemampuan dan kapasitas anggota organisasi untuk mencapai tujuan program PKK. Selain itu, struktur organisasi yang baik juga membantu dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PKK ditingkat Kelurahan merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan program PKK dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Muja Muju.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program PKK di Kelurahan Muja Muju sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, dukungan pemerintah, struktur organisasi yang baik, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Komunikasi yang efektif dan akses yang mudah bagi masyarakat terbukti meningkatkan partisipasi serta kesadaran akan pentingnya kegiatan PKK. Pemerintah Kelurahan memainkan peran sentral dalam menyediakan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai, serta mendukung pengembangan potensi perempuan melalui pelatihan dan pendampingan. Disposisi pelaksanaan yang mencakup identifikasi potensi, alokasi anggaran yang tepat, serta evaluasi berkala memastikan program berjalan efisien dan sesuai tujuan. Selain itu, struktur organisasi yang jelas memperkuat koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga memperbesar peluang keberhasilan dan keberlanjutan program. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat ini menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui program PKK di tingkat local

B. Saran

1. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Disarankan agar pemerintah dan pengurus PKK terus mengembangkan program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk kader serta anggota masyarakat, guna memperkuat kepercayaan diri dan keterampilan mereka dalam mendukung kegiatan PKK.

2. Penguatan Struktur Organisasi dan Evaluasi Berkala

Perlu dilakukan pembenahan struktur organisasi PKK agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan evaluasi rutin dan transparan sangat penting untuk memastikan efektivitas program serta penggunaan sumber daya yang tepat sasaran

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Abigail Rotua Meiroda Sibaerani. (2017). *Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Retok, Kecamatan Retok B*. Jurnal Penelitian Administrasi Negara, 6 (1).

Ashri Bunga Dzikrillah. (2018). *Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan melalui Gerakan PKK di Desa Cihanjuang*. 1 (3), 7-13.

Bambang Nurdewanto, Eny Yuniriyanti, dan Ririn Sudarwati. (2015). *Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Dasa Wisma PKK*. Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis, 2 (1), 99-102.

Iain Syekh Nurjati. (2021). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Organisasi PKK di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon*. Vol 2

Nikmatul Laily Agustin, Slamet Muchsin, Roni Pindahanto Widodo. (2019). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan PKK Dalam Menangani Kesehatan Anak, Ibu Hamil, Dan Lansia Sesuai Isi 10 Program Pokok PKK Di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang*. 13 (2), 33-37.

Nikma Wahyuni Hanis, Atika marzaman. (2019). *Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8 (2), 123-135.

Nunuk Helilusiatiningsih, Nastiti Winahyu, Ribut Santosa. (2022). *Strategi Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di RT 23 RW 9 Puri Panjalu-Betet Indah, Kelurahan Betet Kediri*. Vol 5.

Rizky Indrawati. (2017). *Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Samarinda Utara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5 (2), 861-872.

Ripca Dwi Hadi Agustin. (2016). Peran Ketua PKK dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Jurnal Penelitian Universitas Mulawarman, Vol 4.

Tony Pathony. (2019). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kabupaten Subang. Jurnal Internasional, 1 (2), 262-289.

Internet

<https://eprints.uny.ac.id/22988/5/5.%20BAB%20III.pdf>

<http://repository.stei.ac.id/9269/4/BAB%203.pdf>

Sumber-sumber lain:

Profil Kelurahan Muja-Muju 2024.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Komunikasi antara pihak pemerintah Kelurahan Muja Muju dengan anggota PKK dalam memfasilitasi kegiatan PKK?
2. Fasilitas apa saja yang disediakan oleh pemerintah Muja Muju demi mewujudkan terlaksananya Program PKK?
3. Apakah kebijakan pemerintah Kelurahan Muja Muju sudah efektif dalam memfasilitasi kegiatan organisasi PKK?
4. Bagaimana Struktur dalam pelaksanaan PKK di Kelurahan Muja Muju?
5. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami anggota PKK dalam mewujudkan kegiatan PKK?
6. Usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan baik dari pemerintah kelurahan maupun Anggota PKK itu sendiri?
7. Bagaimana keterlibatan PKK dalam Pembangunan di Kelurahan Muja Muju?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gedung PKK



Kantor TP-PKK Kota



Wawancara Bersama Kuntoro Adiwibowo, A.M.d. selaku Sekretariat



Wawancara Bersama Kumala Ratna, A.M.d. selaku Ketua PKK



Wawancara Bersama Bapak Aris Sukrisna, A.M.d. selaku Lurah



Program PKK